

Makalah Visi dan Misi

Gerakan Lingkungan Hidup Yang Nyata untuk Menghadapi Darurat Bumi

Dana Prima Tarigan

Indonesia menjadi sorotan global karena disatu sisi memiliki bentangan geografik hutan tropis yang luas, dan disisi lain penghancuran hutan pembakaran lahan dan pengerukan sumberdaya alam oleh industri ekstraktif terus terjadi, sementara kebijakan nasional yang diharapkan dapat mengurangi kehancuran seperti moratorium hutan dan sawit tidak terimplementasi dilapangan.

Indonesia tercatat bertahun-tahun sebagai negara pengemisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia, lagi lagi karena konversi hutan yang masif menjadi, antara lain untuk tujuan pembangunan perkebunan dan pertambangan serta infrastruktur. Bahkan, berbagai pihak mencatat Indonesia telah menjadi penghancur hutan terbesar melampaui Brazil. Jurnal Nature Climate Change membandingkan, kerusakan hutan primer di Indonesia antara tahun 2002 hingga 2012 sebesar 47.600 hektar atau 0,84 juta hektar per tahun, sementara Brazil diperiode yang sama sekitar 0,46 juta hektar per tahun

Koversi hutan yang masif disebabkan oleh tata kelola kehutanan yang disengaja mencerabut akses masyarakat lokal dari hutan dengan cara penetapan status hutan secara serampangan sebagai hutan negara. Negara adalah satu satunya otoritas atas hutan sehingga akhirnya dengan leluasa memperjualbelikan ijin diatas hutan. Penetapan ini dianggap sarat kepentingan politik dan rente ekonomi. Atas tuntutan masyarakat sipil, tahun 2013 Mahkamah konstitusi telah membatalkan pasal dalam undang undang kehutanan yang dianggap merugikan masyarakat adat itu.

Presiden Indonesia pada era SBY (2004-2014) telah dua kali mengeluarkan kebijakan moratorium pemberian ijin baru untuk memastikan tidak adanya pengrusakan hutan, yakni npres no 10 tahun 2011 tentang Penundaan Izin Baru Pengelolaan Hutan hingga 2013, dan Inpres no 6 tahun 2013 tentang Perpanjangan Penundaan Izin Baru Pengelolaan Hutan hingga 2015. Walhi mencatat, Pada periode Jokowi, di pulau Jawa saja, terdapat 146 kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup selama periode 2014-2019. Pada Era yang sama, kebijakan moratorium sawit juga dikeluarkan pada tahun 2018 yang lalu. Tetapi pada kenyataannya banyak lembaga independen mencatat masih berlangsungnya penghancuran hutan diberbagai tempat, dan tidak ada upaya penegakan hukum terhadap para pelaku utama. Kontradiksi antara kebijakan dan kondisi dilapangan ini tentu tidak menyumbang baik terhadap upaya mengurangi dampak buruk perubahan iklim.

Secara politik, ruang demokrasi relatif terbuka di era pemerintahan Jokowi di periode I dan kelihatannya termasuk di periode ke II ini. Namun secara ekonomi, pemerintah masih tetap berkiblat pada prinsip pertumbuhan ekonomi yang kapitalistik. Akibat, lingkungan hidup, ruang kelola rakyat, pertanian dan perikanan skala kecil, dan para aktor pendukungnya masih terus menjadi korban. Korban utama adalah kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, petani tak bertanah, nelayan kecil, dan pemuda yang tergusur menjadi pekerja rentan (precariat).

Meski demokratis secara umum, namun jika dianggap mengganggu agenda pembangunan ekonomi, maka represi masih merupakan jalan yang ditempuh apparatus pemerintah. Demokratis kapitalistik adalah situasi dimana ruang politik dan sosial keterlibatan masyarakat terbuka luas, tetapi pengamanan berlebihan dilakukan pemerintah pada pertumbuhan ekonomi. Rejim Jokowi membuka ruang keterlibatan masyarakat untuk urusan sosial, budaya, dan politik. Tetapi, manakala menyangkut ekonomi, pemerintah sangat sensitif karena mengerahkan energi dan anggaran yang luar biasa terhadap pembangunan skala besar pada infrastruktur, perkebunan, perikanan, pertambangan dan pariwisata secara nasional.

Ditengah pemerintah saat ini yang demokratis kapitalistik, maka menjadi tantangan tersendiri bagi WALHI untuk mendorong kebijakan dan praktik pengakuan ruang kelola rakyat, pengakuan hak-masyarakat lokal dan masyarakat adat atas tanahnya yang berbasis pada keadilan gender. WALHI perlu menyuarakan penghentian eksplorasi dan eksploitasi bahan bakar berbasis karbon, seperti minyak, batu bara dan gas, dan segera menginvestasikannya kepada pengembangan energi bersih terbarukan. Yang tidak kalah pentingnya juga perlunya mempercepat reforma agraria dan demokratisasi akses terhadap tanah atau lahan bagi rakyat.

WALHI juga harus mendorong dan memfasilitasi pembangunan sistem energi yang demokratis, terdesentralisasi dan berkelanjutan, yang menggambarkan kebutuhan sosial dan karakteristik dan potensi daerah setempat. Kita perlu memajukan bentuk produksi dan pengelolaan terdiri dari koperasi, unit-unit produksi skala rumah tangga, desa, dan komunitas adat.

Kita telah menghabiskan banyak energi untuk meningkatkan kapasitas dari seminar ke seminar, dari pertemuan ke pertemuan. Kapasitas yang dimiliki sudah saatnya bergerak nyata untuk merubah kondisi buruk ini. Saatnya kita turun ke bawah membangun gerakan yang sistematis, meluas, dan solid. Kedepan, kita juga dituntut melawan kerusakan dan perusak lingkungan dengan data yang akurat serta memanfaatkan teknologi kekinian.

Pertarungan membangun organisasi akar rumput saat ini juga harus disertai dengan keterlibatan mempengaruhi politik di level nasional dan daerah. Kebijakan publik harus kita pengaruh, karena dengan hadirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan lingkungan hidup, kita punya alat perjuangan yang lebih kuat untuk mendorong perubahan ke arah penyelamatan lingkungan hidup.

VISI

WALHI menjadi organisasi yang kuat, mandiri, mengakar, dan berpengaruh menuju tata kelola lingkungan hidup lestari dan berkeadilan yang berbasis rakyat di Indonesia

MISI

Misi yang saya usung adalah kombinasi dari tiga pilar:

1. Mewujudkan organisasi lingkungan hidup yang solid, berbasis kekuatan rakyat, kesetiakawanan, berkeadilan gender dan pengetahuan yang berpihak kepada rakyat dan keadilan ekologi.
2. Mempromosikan advokasi perubahan atas agenda, kebijakan dan praktik lingkungan hidup yang berkeadilan berbasis data dan teknologi informasi yang inovatif
3. Mewujudkan tatanan sumberdaya dan ekonomi berkeadilan dengan karakter kerakyatan dan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan
4. mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kewajiban Negara menjalankan konstitusi terdiri dari

STRATEGI DAN AKSI

Berikut strategi aksi yang diuraikan dari masing masing misi diatas.

Strategi mewujudkan organisasi lingkungan hidup yang solid, berbasis kekuatan rakyat, kesetiakawanan dan pengetahuan yang berpihak kepada rakyat dan keadilan ekologi:

1. Membangun gerakan lingkungan berbasis massa dan kader lingkungan hidup yang solid, meluas dan masif melalui *gerakan turun ke bawah*.
2. Membangun sinergitas advokasi di setiap level organisasi WALHI.
3. Membangun jaringan dan solidaritas yang kuat dengan organisasi nasional dan internasional yang sesuai dengan prinsip prinsip WALHI.
4. Menciptakan blok politik hijau sebagai kekuatan politik alternatif di Indonesia.

Kedua, strategi untuk mempromosikan advokasi perubahan atas agenda, kebijakan dan praktik lingkungan hidup yang berkeadilan berbasis data dan teknologi informasi yang inovatif, terdiri dari:

1. Membangun gerakan lingkungan berbasis data dan inovasi teknologi informasi
2. Mempromosikan dialog dengan multi pihak utamanya negara, dalam rangka perubahan agenda dan kebijakan dengan platform yang diciptakan oleh WALHI.
3. Mempromosikan agenda dan peta jalan alternatif ekologi yang demokratis, berkeadilan untuk berhadapan dengan agenda ekonomi global yang kapitalistik, destruktif dan eksploitatif.
4. Membangun keterlibatan massa luas melalui kampanye media digital yang kreatif.

Ketiga, strategi mewujudkan tatanan sumberdaya dan ekonomi berkeadilan dengan karakter kerakyatan dan berbasis lingkungan hidup berkelanjutan:

1. Mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan hasil wilayah kelola rakyat yang berbasis kepada lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Mendorong pengakuan dan perlindungan atas keanekaragaman relasi masyarakat lokal dan adat dengan hutan dan lingkungan dalam menjalankan keberlangsungan kehidupan dan ekonominya.
3. Menggali dan mempromosikan kekayaan pengetahuan lokal yang memastikan keselamatan rakyat dan lingkungannya.

Ke empat, strategi mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kewajiban Negara menjalankan konstitusi terdiri dari:

1. Memperluas kepastian akses terhadap keadilan untuk masyarakat
2. Mendorong penegakan dan penyelesaian kasus-kasus HAM oleh negara
3. Mengawal kedaulatan suara rakyat dalam proses demokrasi